

**ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)**

STUDI PADA DESA PANGGUNGHARJO BANTUL



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRARA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

M. KHAIRUL AMRULLAH

14810098

DOSEN PEMBIMBING:

MUH. RUDI NUGROHO, S.E., M.Sc

NIP. 198202192015031002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1777.6/Un.02/DEB/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul: ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DENGAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (AHP) STUDI PADA DESA PANGGUNGHARJO BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. KHAIRUL AMRULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14810098
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.
NIP. 19820219 201503 1 002

Penguji I

Sofyan Hadinata, M.Sc.

NIP. 19851121 201503 1 005

Penguji II

Lailatis Syarifah, Lc., M.A
NIP. 19820709 000000 2 301

Yogyakarta, 11 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Khairul Amrullah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Khairul Amrullah

NIM : 14810098

Judul Skripsi : **“Analisis Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Metode Analythical Hierarcy Process (AHP) Studi Pada Desa Panggunharjo Bantul”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 April 2018

Pembimbing,

Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc

NIP. 19820219 201503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Khairul Amrullah
NIM : 14810098
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Studi Pada Desa Panggungharjo Bantul**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote*, *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Penyusun



M. Khairul Amrullah
NIM: 14810098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Khairul Amrullah
NIM	: 14810098
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Metode *Analythical Hierarchy Process* (AHP) Studi Pada Desa Panggungharjo Bantul”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penuli/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 April 2018

Yang menyatakan


M. Khairul Amrullah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas limpahan rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan:

Teruntuk orang terhebat dalam hidup, Abi dan Ummi (ayahanda Subkhi dan Ibunda Amriyah). Terima kasih yang tiada terkira dalam bilangan dan tiada terbatas dalam waktu. Terima kasih untuk segala cinta, doa dan dukungannya.

Teruntuk yang tersayang keluarga, sahabat dan semua pihak yang telah menemani berjuang sejauh ini.

*Teruntuk yang tercinta Almamaterku UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ف	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
ق	Gain	g	Ge
ك	Fā'	f	Ef
ل	Qāf	q	Qi
م	Kāf	k	Ka
ن	Lām	l	El
و	Mim	m	Em
ه	Nūn	n	En
ء	Waw	w	W
ي	Hā'	h	Ha
	Hamzah	‘	Apostrof
	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. *Ta'marbūtah*

Semua *Ta'marbūtah* ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang dikutip oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

ـَ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ـُ	Ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	Ditulis	<i>Ai</i>
2	بينكم Dammah + wawumati قول	Ditulis	<i>bainakum</i>
		Ditulis	<i>au</i>
		Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyah* tersebut.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Studi Pada Desa Panggunharjo Bantul”**. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata I Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

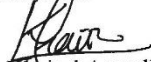
1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi MA. Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Sunaryati, SE., M.Si., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muh. Rudi Nugroho, SE., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar megarahkan dan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta Bapak dan Ibu ku tercinta, Subkhi dan Amriyah, serta saudara-saudara ku yang telah menjadi inspirasi, sumber motivasi terbesar dalam hidup penulis serta dengan tulus dan ikhlas memberikan dukungan dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kiai dan ustad-ustad yang senantiasa mendidik dan mengajarku agama dan mengaji.
9. Keluarga yang berada Brebes yang selalu memberikan dukungan.
10. Teman-teman angkatan 2014 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terutama kelas c UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Teman-teman Safinaturrahmah Sapien Yogyakarta.
13. Teman-teman di Pondok Modern Darussalam Ponorogo.
14. Teman-teman ikatan konsulate Pekalongan Pondok Modern Darussalam.
15. Teman-teman KKN '93 Dusun Ngloro, Ngloro, Saptosari, Gunungkidul.
16. Teman-teman yang telah menemani hoby saya dalam mendaki.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 26 April 2018

Penyusun


M. Khairul Amrullah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D.Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A.Telaah Pustaka	12
B.Landasan Teori.....	16
1. Pengembangan Ekonomi Masyarakat	16
a. Konsep Pengembangan Masyarakat.....	16
b. Konsep Ekonomi Kerakyatan.....	18
2. Pembangunan Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui BUMDes	20
a. Pengertian Desa	21
b. Dana Desa.....	22
c. Pengembangan Potensi Desa.....	24
d. Kesejahteraan Masyarakat Melalui BUMDes	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Penentuan Lokasi Penelitian	31
C. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	36
1. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)	36
2. Analisis AHP	37
3. Evaluasi Model Pengukuran.....	44
G. Paradigma Penelitian.....	45
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pengembangan Ekonomi Melalui BUMDes di Desa Panggungharjo	46
1. Pertumbuhan dan Kegiatan Ekonomi BUMDes Panggungharjo	46
2. Kendala BUMDes Panggungharjo dalam Pengembangan Usaha	55
3. Hasil Analisis SWOT terhadap Implementasi BUMDes Panggungharjo	59
B. Hasil Analisis Strategi Pengembangan BUMDes.....	61
1. Menguji Model Pengukuran	61
a. Uji Reliabilitas.....	61
b. Uji Validitas.....	62
2. Hasil Analisis Metode AHP	62
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82
CURICULUM VITAE.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Telaah Pustaka	14
Tabel 2.2 Perbedaan antara BUMDes dan Lembaga Hukum Lainnya	28
Tabel 3.1 Intensitas Dari Kepentingan Pada Skala Absolut	40
Tabel 4.4 Analisis SWOT terhadap Implementasi BUMDes Panggungharjo	60
Tabel 4.5 Reliability Statistics	61
Tabel 4.6 Nilai Uji Validitas	62
Tabel 4.7 Variabel Hierarki dengan Goal/ Tujuan Strategi Pengembangan BUMDes	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Perubahan Modal BUMDes Panggungharjo	7
Gambar 3.2. Paradigma Pemikiran Peneliti	45
Gambar 4.1. Pertumbuhan Modal dan Aset BUMDes Panggungharjo Bantul.....	49
Gambar 4.2. Alur Pengelolaan Sampah BUMDes Panggungharjo	51
Gambar 4.3. Data Perkembangan Jenis dan Besaran Pendapatan	55
Gambar 4.8. Hasil Analisis AHP Kriteria Pengembangan BUMDes Panggungharjo	66
Gambar 4.9. Hasil Analisis AHP Alternatif Pengembangan BUMDes Panggungharjo Aspek Ketenagakerjaan	68
Gambar 4.11. Hasil Analisis AHP Alternatif Pengembangan BUMDes Panggungharjo Aspek Teknologi Inovasi	71
Gambar 4.12. Hasil Analisis AHP Alternatif Pengembangan BUMDes Panggungharjo Aspek Lingkungan Usaha.....	73
Gambar 4.13. Hasil Analisis AHP Alternatif Pengembangan BUMDes Panggungharjo Aspek Permodalan	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Reabilitas dan Validitas	86
Lampiran 2 Pedoman wawancara ketua dan pengelola BUMDes Panggung Lestari	88
Lampiran 3 Kuisisioner Analisis AHP	89
Lampiran 4 Hasil Perhitungan Kuisisioner AHP	103
Lampiran 5 Surat Penelitian dari Fakultas	106
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian KESBANPOL	107
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian BAPPEDA Bantul.....	108
Lampiran 8 Dokumentasi	109



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The villages became the lowest unit of state in constitution in Indonesia, where the village is currently entering a new era after the birth of the village law. Villages are expected to be socially, culturally, economically and politically self-reliant. BUMDes as a business and economic institution is expected to welcome the village community to be more independent, especially in the economic field. Purpose of this research to know policy priority that can be taken as BUMDes development strategy. And BUMDes Panggungharjo Bantul is used as an object in this research. This research uses analytical analysis of process hierarchy to determine the priority of development policy of BUMDes Panggungharjo Bantul. And the research results show the first position of qualified workforce, followed by marketing strategy, the existence of innovation technology, supportive business environment, and the last existence of capital.

Key word: BUMDes, Developing of BUMDes, AHP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Desa menjadi satuan wilayah terendah dalam perangkat ketatanegaraan di Indonesia, dimana desa saat ini memasuki era baru setelah lahirnya UU desa. Desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga usaha dan perekonomian diharapkan menyongsong masyarakat desa untuk dapat lebih mandiri, khususnya di bidang ekonomi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prioritas kebijakan yang dapat diambil sebagai strategi pengembangan BUMDes, dimana BUMDes Panggungharjo Bantul digunakan sebagai objek dalam penelitian ini. Dan analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk menentukan strategi pengembangan BUMDes studi pada desa Panggungharjo Bantul. Hasil penelitian menunjukkan posisi pertama tenaga kerja yang berkualitas, disusul dengan strategi pemasaran, adanya teknologi inovasi, lingkungan usaha yang mendukung, dan terakhir adanya permodalan.

Kata kunci: BUMDes, Pengembangan BUMDes, AHP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di seluruh dunia peran usaha kecil dan menengah semakin menonjol, jenis usaha ini dapat didirikan di perkotaan atau pedesaan. Dua alasan utama keberadaan usaha kecil dan menengah ini adalah: (1) memberikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan merekomendasikan barang dan jasa kepada perusahaan, (2) untuk menciptakan barang dan jasa yang diinginkan sehingga menjadi investasi sendiri bagi usaha tersebut (Kham Jan dan Khalique, 2014).

Wong dan Aspinwall menyampaikan bahwa perusahaan bisnis kecil dan menengah telah memainkan peran penting dalam perekonomian di negara manapun. Menurut Asia-Pacific Co-operation (APEC), di setiap negara di Asia Pasifik kerja sama usaha kecil dan menengah telah menyumbang lebih dari 90% dari semua perusahaan untuk kegiatan perekonomian kebanyakan negara di dunia, permintaan akan usaha kecil dan menengah semakin meningkat dan menjadi fitur yang mereka kenali (Khan Jan dan Khalique, 2014).

Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi rakyat mutlak diperlukan negara khususnya untuk negara berkembang. Ditengah terpaan badai krisis ekonomi global dan persaingan yang ketat dalam usaha maka tranformasi perekonomian suatu Negara pasti akan terjadi dan mengarah pada kemajuan atau ketertinggalan bahkan kehancuran tergantung pada kekuatan merespon tuntutan tersebut.

Pembangunan nasional yang baik adalah yang diarahkan pada tercapainya standar kualitas hidup masyarakat, baik tingkat kesejahteraannya maupun kesehatan dan pendidikan. Pembangunan ekonomi merupakan bagian penting bagi pembangunan masyarakat. Kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat, mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat (Ismail, 2015).

Menurut Budiono (2015) Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan di tingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan.

Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional (Yanuardi, 2015).

Yanuardi menambahkan bahwa pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Oleh karena itu, pembangunan desa dan kawasan pedesaan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan

antar wilayah. Perkembangan desa di Indonesia meningkat pesat dengan rata-rata pertumbuhan 2,29 persen atau 1.409 desa pertahun. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dari masyarakatnya (Soleh, 2017).

Pembangunan desa merupakan salah satu dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetensi secara global (Harmiati, 2017).

Perekonomian Indonesia diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam tiga pelaku utama perekonomian, yaitu: BUMN/D, Koperasi dan Swasta (Harmiati, 2017).

Berdasarkan kajian teoritis mengenai perekonomian desa di dapati bahwa desa memiliki kondisi modal sosial yang sangat kuat dan mengakar. Berdasarkan realitas tersebut, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong-royong untuk mendayagunakan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber

daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Harmiati, 2017).

Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan BUMDes akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa (Budiono, 2015).

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Yanuardi, 2015).

Oleh karena itu, logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting

adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Wicaksono *et al.*, 2017).

Selanjutnya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa, perlu didukung pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi Sosial SMERU, Akhmad Fadli menjelaskan bahwa undang-undang desa mensyaratkan tiap desa agar memiliki BUMDes, dimana konsep usaha toko ritel dapat dimungkinkan untuk dibangun sebagai satu implementasi bentuk unit BUMDes. Perlu adanya komitmen pemerintah pusat hingga desa untuk membentuk gugus pemasaran berjejaring melalui BUMDes. Jika pemerintah tidak mempersiapkan jaringan pasar, maka produk dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk lainnya yang berada di kawasan ASEAN (Harmiati, 2017).

Masyarakat Ekonomi ASEAN membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas regional, dimana masing-masing negara memiliki peluang yang sama untuk saling berkompetisi. Era perdagangan global ditandai pula dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, sehingga membuat batas-batas antar negara semakin semu. Indonesia memposisikan diri sebagai sumber daya potensial, baik alam maupun manusianya untuk disikapi secara arif oleh pemangku kepentingan agar dapat bersaing melalui peningkatan daya saing pelaku usaha. Dengan eksistensi BUMDes, sebagai lembaga legal dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat lokal (desa), diharapkan dapat melahirkan produk unggulan lokal yang mampu menjadi citra positif dalam kompetisi pasar bebas (Harmiati, 2017).

Perkembangan BUMDes di Indonesia cukup pesat. Pada tahun 2014 jumlah BUMDes hanya 1.022 unit, tetapi pada tahun 2017 jumlah BUMDes meningkat menjadi 18.446 unit. Berdasarkan jumlah tersebut, Provinsi Aceh menempati daerah dengan BUMDes paling banyak, yaitu 6.728 unit atau sekitar 36,4 persen. Posisi kedua disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah BUMDes sebanyak 2.964 unit atau setara 16 persen, sedangkan Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.424 unit atau 7,7 persen (Bambang, 2017).

Di Kabupaten Bantul sendiri, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2014 mencapai 12 Unit dari 71 Desa yang tersebar di 17 Kecamatan, BUMDes Panggungharjo adalah salah satunya. Dari gambar grafik di atas keberadaan dan kinerja BUMDes Panggungharjo mampu memberikan kontribusi yang signifikan, terlihat dari perkembangan perubahan modal BUMDes yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dari modal awal sebesar Rp. 37 juta (tiga puluh tujuh juta rupiah) hingga pada tahun 2016 mencapai Rp. 780 juta (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kenaikan modal ini didukung dengan perkembangan unit usaha yang dari awal berdirinya hanya satu unit usaha hingga sekarang menjadi 5 unit usaha.¹ Berikut perkembangan modal BUMDes Panggungharjo Bantul.

¹ Database Pendirian BUMDes Panggungharjo Lestari Panggungharjo



**Gambar 1.1 Perkembangan Perubahan Modal BUMDes Panggungharjo
(X 1000)**

Sumber: Database Pendirian BUMDes Panggungharjo Bantul

Di Desa Panggungharjo sendiri telah mendirikan BUMDes Pada tahun 2013 tepatnya pada 25 Maret, dimana Pemerintah Desa Panggungharjo mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Panggung Lestari sebagai upaya pendayagunaan patalogi sosial desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari desa Panggungharjo adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa.²

² <http://www.panggungharjo.desa.id/bumdes>, diakses pada 11 Desember 2017 pukul 10: 11 WIB

BUMDes Panggungharjo yang ditunjuk sebagai lembaga perekonomian desa perlu dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan umum dan optimalisasi aset desa, selain itu pengembangan BUMDes Desa Panggungharjo dilakukan guna menompang kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Panggungharjo. Dalam strategi pengembangan BUMDes desa Panggungharjo peneliti menggunakan metode *Analythical Hierarchi Process*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks menjadi suatu yang hirarki (Darmanto *et al.*, 2014).

Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Keputusan yang diambil dari metode AHP ini nantinya akan digunakan sebagai strategi dalam pengembangan BUMDes Panggungharjo Bantul (Darmanto *et al.*, 2014).

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana BUMDes berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa Panggungharjo dan strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan BUMDes Panggungharjo itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DENGAN METODE ANALYTHICAL HIERARCHY PROCESS (AHP). STUDI PADA DESA PANGGUNGHARJO BANTUL”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengembangan ekonomi melalui BUMDes pada Desa Panggungharjo Bantul?
2. Bagaimana Strategi kebijakan prioritas yang tepat dalam mengembangkan BUMDes Panggungharjo dengan metode AHP guna mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Panggungharjo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Panggungharjo Bantul
2. Untuk mengetahui strategi kebijakan prioritas yang didapatkan dari metode AHP dalam rangka pengembangan BUMDes Panggungharjo guna meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Panggungharjo.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.
2. Pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya

lokal yang dimiliki desa. Serta menjadi referensi dalam hal keilmuan pengembangan ekonomi masyarakat.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat Desa Panggungharjo agar lebih bersikap partisipatif dalam mengembangkan dan mengelola potensi desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang perlunya menganalisis pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Latar belakang ini menjadi masukan bagi terbentuknya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II: Landasan Teori

Bab kedua memuat landasan teori yang menjelaskan telaah pustaka dan kerangka teoritik. Telaah pustaka yang berisi tentang hasil penelitian terdahulu terkait peran BUMDes dalam ekonomi masyarakat serta keunikan penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teoritik berisi teori-teori pengembangan ekonomi masyarakat.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ketiga merupakan bagian metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, penentuan populasi dan sampel, jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya dan metode AHP sebagai solusi pengembangan objek penelitian.

Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab empat merupakan bagian analisis data dan pembahasan. Bagian ini meliputi isi dari rumusan masalah dan deskripsi dari data-data dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti yang kemudian di analisis dengan metode SWOT dan penggunaan metode AHP dalam mengembangkan BUMDes guna mengembangkan perekonomian masyarakat.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup. Bagian penutup berisikan tentang kesimpulan akhir penelitian yang menghasilkan seberapa besar kontribusi BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, dan partisipasi masyarakat sendiri dalam pengembangan BUMDes serta strategi kebijakan prioritas yang dapat digunakan dalam mengembangkan BUMDes. Di bagian penutup juga memuat saran-saran yang terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa adanya BUMDes Panggungharjo mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Namun karena sumber daya manusia yang belum mahir dalam mengolah unit-unit usahanya membuat BUMDes Panggungharjo belum maksimal dalam menjalankan unit-unit usahanya.
2. Berdasarkan hasil analisis prioritas kebijakan dalam Pengembangan BUMDes Panggungharjo. Bahwasannya, ketenagakerjaan yang berkualitas sebagai kriteria pertama dan dapat dikatakan sebagai strategi utama dalam pengembangan BUMDes Panggungharjo, kemudian disusul dengan strategi pemasaran sebagai prioritas kedua, adanya teknologi inovasi yang dikembangkan di BUMDes sebagai prioritas ketiga, lingkungan usaha yang mendukung sebagai prioritas keempat, dan terakhir adanya permodalan baik dari para penyedia dana, dari pihak Bank atau non Bank.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes supaya segera lebih efektif dalam menjalankan unit-unit usahanya dengan memberi pelatihan kepada masyarakat agar tujuan dari BUMDes lebih maksimal sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata.
2. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDes ini, kemudian memberi pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti ini lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Atshil M. (2017). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam, IAIN Imam Bonjol Padang, Vol 1, No 2*.
- Andi Nu G. (2015). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi. Universitas Kanjuruhan Malang*
- Atmojo, Fridayani, Kasiwi, Pratama. (2017). Efektifitas Dana Desa Untuk Pembangunan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintah, Vol.5 No.1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Bambang. (2016). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer. *Jurnal Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman*
- Dantika, Yanuardi. (2015). Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal*
- Darmanto Eko, Noor Latifah, Nanik Susanti. (2014). Penerapan Metode AHP (Analythic Hierarchy Process) Untuk Menentukan Kualitas Gula Tumbu. *Jurnal Simetris, Vol 5 No 1 April 2014 ISSN: 2252-4983*.
- Dokumentasi. (2018). Database Profil BUMDes Panggungharjo.
- Efendi, Guntur. (2009). *Kube Sebagai Suatu Paradigma Alternatif Dalam Membangun Soko Guru Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Tranformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan)*. Jakarta: CV Sagung Seto
- Evangelos, Stuart H. Mann. (1995). Using The Analytic Hierarchy Process For Decision Making In Engineering Applications: Some Challenges. *Jurnal Of Industrial Engineering: Application and Practive, Vol. 2, No 1, pp. 35-44*

- Harmiati, Zulkhakim. (2017). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Infokop*. Volume 16 (9), 143-154
- Hayuna, Pratiwi dan Mindarti. (2012). Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 No 1. Universitas Brawijaya Malang.
- Herlina. (2012). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. *Skripsi. Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Ismail Muhammad. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat Di Provinsi Papua Development Strategies In Papua Economic Demokrasi. *Jurnal Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri*
- Khan Wasim Jan, Khalique. (2014). An Overview of Small and Medium Enterprise in Malaysia and Pakistan: Past, Present and Future Scenario. *Journal Business and Management Horizins*, ISSN 2326-0297, Vol.2, No.2
- Kurniawan Eka. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Maritim Raja Ali Haji*
- Latifah Siti. (2005). Prinsip-prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process. *Jurnal e USU Repository. Universitas Sumatra Utara*
- Jamal M A. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mubyarto. (1996). *Strategi Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- Natalia Artha M. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains Vol. 2 No 1. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado*
- Nugroho M Rudi *et.al*, (2017). Analisa Pengembangan Sektor Unggulan Di Kota Malang. *Laporan Akhir Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang*

- Padmowati, Rose de Lima Endang. (2009). Pengukuran Indeks Konsistensi Dalam Proses Mengambil Keputusan Menggunakan Metode AHP. *Jurnal. UPN "Veteran" Yogyakarta ISSN: 1979-2328*
- Pratiwi, Supriyono, Hanafi. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 4, Hal 9-14. Universitas Brawijaya Malang.*
- Puguh Budiono. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bonjonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari- Maret, 116-125*
- Raco J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Grasindo. Jakarta
- Rahayu Dwi T. (2016). Penerapan Analisis Swot Dalam Perumusan Strategi Bersaing. *Jurnal Ekonomi dan Riset Akuntansi, Vol 5 No 2, Februari ISSN: 2460-0585*
- Riyanti Nunuk. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Desa Singopuran. *Artikel Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Samadi, Arrafiqur R, Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih). *Jurnal Ilmu Ekonomi*
- Setyawati Sulis. (2017). Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Di Desa Karang Tunggal Kutai KartaNegara. *eJournal Administrasi Negara, Vol. 5 No. 3: 6254-6268*
- Sholeh Ahmad. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai Vol.5 No.1*
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Jurnal Harmoni, Vol. 11 No. 2. Institut Seni Indonesia Surakarta*
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syahara Yuni, Meirinawati. Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Bada Usaha Milik Desa (Studi Pada Program Agrobisnis Pertanian (PUAP) *Jurnal Ilmu Ekonomi*
- Syaifullah. (2010). Pengenalan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process). *Linse Dokument Copyright @Februari Syaifullah08. Wordpress.com*

- Web. <http://www.panggungharjo.desa.id/bumdes/>. Diunduh pada 11 Desember 2017
- Web. [http://pmd.bantulkab.go.id/data/list/0/5/28-data-pemberdayaan-badan-usaha-](http://pmd.bantulkab.go.id/data/list/0/5/28-data-pemberdayaan-badan-usaha-ekonomi-desa-bumdes) ekonomi-desa-bumdes. Diunduh pada 11 Desember 2017
- Wawancara. (2018). Eko Pambudi. Ketua BUMDes Panggungharjo Bantul. Pada 21 Maret 2018
- Wawancara. (2018). Toto Sudiarko. Manajer Usaha Pengelolaan Lingkungan. BUMDes Panggungharjo. Pada 24 Maret 2018
- Wawancara. (2018). Junaidi Imfat. Kepala Unit Swadesa. BUMDes Panggungharjo. Pada 22 Maret 2018
- Wawancara. (2018). Pak Andi. Manajer UCO. BUMDes Panggungharjo. Pada 24 Maret 2018
- Wicaksono, Surya dan Eddy. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa *eJournal Ilmu Pemerintah*, 5 (4): 1637-1650.ip.fisip-unmul.ac.id
- Widjajanti Kesi. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal ekonomi Pembangunan*, Vol 12, No 1, hlm 15-27
- Willy Amanda H. (2015). Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Negeri Surabaya*

Lampiran

Lampiran 1 Hasil Uji Reabilitas dan Validitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	10	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	10	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.849	.816	24

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	10	83.3
	Excluded ^a	2	16.7
	Total	12	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.637	.563	5

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	SUMY
Y1	Pearson Correlation	1	.050	-.172	.267	.161	.302
	Sig. (2-tailed)		.892	.635	.456	.657	.397
	N	10	10	10	10	10	10
Y2	Pearson Correlation	.050	1	.120	.012	.120	.277
	Sig. (2-tailed)	.892		.741	.974	.741	.438
	N	10	10	10	10	10	10
Y3	Pearson Correlation	-.172	.120	1	.253	.505	.630
	Sig. (2-tailed)	.635	.741		.481	.137	.051
	N	10	10	10	10	10	10
Y4	Pearson Correlation	.267	.012	.253	1	.732*	.807**
	Sig. (2-tailed)	.456	.974	.481		.016	.005
	N	10	10	10	10	10	10
Y5	Pearson Correlation	.161	.120	.505	.732*	1	.917**
	Sig. (2-tailed)	.657	.741	.137	.016		.000
	N	10	10	10	10	10	10
SUMY	Pearson Correlation	.302	.277	.630	.807**	.917**	1
	Sig. (2-tailed)	.397	.438	.051	.005	.000	
	N	10	10	10	10	10	10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 2 Pedoman wawancara ketua dan pengelola BUMDes Panggung Lestari

1. Bagaimana kondisi Masyarakat sebelum adanya BUMDes Panggung Lestari?
2. Bagaimana sejarah adanya BUMDes Panggung Lestari.
 - a. Siapa pendiri dan penggagas berdirinya Panggung Lestari?
 - b. Apa yang melatar belakangi berdiri BUMDes Panggung Lestari?
3. Apa visi dan misi terbentuknya BUMDes Panggung Lestari.
 - a. Visi?
 - b. Misi?
4. Bagaimana permodalan yang di kembangkan untuk BUMDes Panggung Lestari.
 - a. Modal awal?
 - b. Pengelolaan modal?
5. Bagaimana Perkembangan BUMDes Lestari.
 - a. Jumlah unit usahanya?
 - b. Pekerja/ karyawan yang berkecimpung di dalamnya?
6. Bagaimana Monitoring dan Evaluasi BUMDes Panggung Lestari.
 - a. Monitoring?
 - b. Evaluasi?
7. Aset yang di miliki BUMDes Panggung Lestari.
 - a. Aset di setiap tahun?
 - b. Total aset sekarang?
8. Kontribusi apa yang telah di berikan BUMDes Panggung Lestari terhadap masyarakat?
9. Apa faktor pendukung dan penghambat BUMDes Panggung Lestari.
 - a. Faktor pendukung?
 - b. Faktor penghambat?
10. Bagaimana Partisipasi yang di berikan masyarakat terhadap BUMDes Panggung Lestari?

Lampiran 3 Kuisisioner Analisis AHP**Data Responden**

Nama Lengkap :

Jabatan :

Pangkat Golongan :

Unit Kerja :

No Telp/HP :

Email :

Alamat :

Jenis Kelamin : Pria/Wanita*

Pendidikan Terakhir : SD/SMP/SMU/ Akademi/ S1/ S2/ S3*

*Coret yang tidak perlu

Tanda Tangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**KUESIONER ANALITYCAL HIERARCHI PROCES (AHP) ATAS
PERUMUSAN PENGEMBANGAN BUMDES PANGGUNGHARJO BANTUL**

1. Penjelasan singkat penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi atau penilaian responden yang dianggap ahli atas perumusan prioritas suatu kebijakan dalam rangka strategi pengembangan BUMDes Panggungharjo Bantul.
- b. Kegunaan penelitian ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam upaya pengembangan unit usaha milik desa untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat desa tersebut.
- c. Penilaian responden atas aspek dan kriteria yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari masyarakat yang dianggap ahli, mengerti akan suatu permasalahan tersebut. Sehubungan dengan perumusan prioritas kebijakan dalam rangka strategi pengembangan BUMDes Panggungharjo Bantul, maka responden dalam penelitian ini ialah pihak pemerintah Desa Panggungharjo, kepala BUMDes Panggungharjo, ketua koordinator tiap unit usaha, akademisi, masyarakat yang terlibat dalam BUMDes Panggungharjo.

- d. Mengingat pentingnya masukan dari Bapak/Ibu, mohon kiranya dapat memberikan penilaian dalam kuesioner berikut.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan Bapak/Ibu, maka penulisan skripsi ini tidak berhasil.

- e. Kuesioner ini sifatnya penelitian, maka segala masukan yang Bapak/Ibu berikan akan terjamin kerahasiaannya.

2. Prinsip Dasar dan Petunjuk Pengisian Kuesioner AHP

2.1 Prinsip Dasar AHP

AHP merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang sifatnya sederhana dan bermanfaat untuk mendukung suatu proses pengambilan keputusan. Proses AHP yaitu dengan membandingkan prioritas dalam antar elemen dalam suatu hirarki yang sedang dipertimbangkan. Penilaian hasil dari proses perbandingan tersebut menggunakan metode skala 1 sampai 9 dengan variabel yang mendapat prioritas tertinggi maka akan menjadi pilihan terbaik.

Struktur hirarki dalam pengisian kuesioner ini terdiri dari:

1. Tingkat pertama adalah goal atau tujuan yaitu Strategi Pengembangan Pengembangan BUMDes Desa Panggungharjo Bantul.
2. Tingkat kedua adalah kriteria strategi kebijakan pengembangan pariwisata daerah, yang terdiri dari:
 - a. Lingkungan Usaha (Budaya, Sosial, dan Keamanan) yang mendukung.
 - b. Adanya akses Permodalan
 - c. Ketenagakerjaan berkualitas

- d. Adanya Teknologi inovasi
 - e. Sitem Pemasaran yang baik
3. Tingkat ketiga adalah alternatif kebijakan pengembangan BUMDes Desa Panggungharjo Bantul, yang terdiri dari:

Struktur hirarki yang digunakan disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut struktur hirarki mengenai strategi kebijakan dalam rangka Pengembangan BUMDes Panggungharjo Bantul.

Penilaian terhadap elemen-elemen dari setiap level hirarki didasarkan atas bobot prioritasatas kepentingannya. Penilaian pada responden dinyatakan secara numerik (sakala 1 sampai 9) dengan devenisi verbal sebagai berikut:

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Agak lebih penting	A lebih penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Ragu-ragu dalam menentukan skala missal 2 antara 1 dan 3
Reciprocal	Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$	Asumsi masuk akal

- a. Proses penilaian kepentingan relatif antara dua elemen tersebut dan berlaku aksioma reciprocal, artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibandingkan elemen j , maka elemen j harus sama dengan $1/3$ kali lebih penting dibandingkan elemen i .

- b. Jika elemen pada kolom sebelah kiri lebih penting dibandingkan dengan elemen sebelah kanan, maka nilai perbandingan ditulis pada sebelah kiri dan jika sebaliknya maka ditulis sebelah kanan

Contoh Pemberian Bobot :

Jika factor **A** mutlak lebih penting dari faktor B, maka diisi :

Faktor A	9	8	7	6	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor B
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

Atau,

Jika factor **B** lebih penting dari faktor A, maka diisi:

Faktor A	9	8	7	6	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor B
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

- c. Setelah melakukan pembobotan, responden akan diminta mengurutkan tiap-tiap faktor berdasarkan tingkat kepentingannya. Semakin kecil nomor urutan, semakin besar tingkat kepentingan faktor tersebut. Sebagaimana contoh berikut:

Faktor	Urutan
A	2
B	3
C	1
...	...
N	N

3. Daftar pertanyaan responden, sebagai berikut:

1. Berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan BUMDes ? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2)

Lingkungan usaha (Budaya, Sosial, dan Keamanan)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Adanya akses Permodalan
Lingkungan usaha (Budaya, Sosial, dan Keamanan)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Adanya Teknologi Inovasi
Lingkungan usaha (Budaya, Sosial, dan Keamanan)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sistem Pemasaran yang baik
Lingkungan usaha (Budaya, Sosial, dan Keamanan)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Ketenagakerjaan
Adanya akses Permodalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Adanya Teknologi Inovasi
Adanya akses Permodalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sistem Pemasaran yang baik
Adanya akses Permodalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ketenagakerjaan yang berkualitas
Adanya Teknologi Inovasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sitem Pemasaran yang baik
Adanya Teknologi Inovasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ketenagakerjaan yang berkualitas
Sistem Pemasaran yang baik	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ketenagakerjaan yang berkualitas

Urutan Prioritas Kepentingan :

Faktor	Urutan
Lingkungan usaha (Budaya, Sosial, dan Keamanan) yang mendukung	
Adanya akses Permodalan	
Adanya Teknologi Inovasi	
Sistem Pemasaran yang baik	
Ketenagakerjaan yang berkualitas	

2. Aspek Lingkungan Usaha (Budaya, Sosial, Politik, dan Keamanan)

Diperlukan lingkungan keamanan yang kondusif dalam menunjang usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya strategi meminimalisir gejala sosial (seperti demonstrasi dll)
Diperlukan lingkungan keamanan yang kondusif dalam menunjang usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diperlukan kebijakan Pemda yang dapat menjamin kepastian lingkungan sosial yang kondusif
Diperlukan lingkungan keamanan yang kondusif dalam menunjang usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemudahan pelayanan perizinan bagi desa dalam membuat BUMDes
Pentingnya strategi meminimalisir gejala sosial (seperti demonstrasi dll)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diperlukan kebijakan Pemda yang dapat menjamin kepastian lingkungan sosial yang kondusif
Pentingnya strategi meminimalisir gejala sosial (seperti demonstrasi dll)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemudahan pelayanan perizinan bagi desa dalam membuat BUMDes
Diperlukan kebijakan Pemda yang dapat menjamin kepastian lingkungan sosial yang kondusif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemudahan pelayanan perizinan bagi desa dalam membuat BUMDes

Urutan Prioritas kepentingan :

Faktor	Urutan
Diperlukan lingkungan keamanan yang kondusif dalam menunjang usaha	
Pentingnya strategi meminimalisir gejala sosial (seperti demonstrasi dll)	

Diperlukan kebijakan Pemda yang dapat menjamin kepastian lingkungan sosial yang kondusif	
Kemudahan pelayanan perizinan bagi desa dalam membuat BUMDes	

3. Aspek Permodalan

Diperlukan kemudahan akses permodalan dari pihak perbankan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diperlukan kemudahan akses permodalan dari pihak non bank (seperti koperasi atau lembaga kredit mikro)
Diperlukan kemudahan akses permodalan dari pihak perbankan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diperlukan kebijakan Pemda dalam memediasi antara BUMDes dengan pihak yang menyediakan sumber pendanaan (seperti CSR, perbankan, dll)
Diperlukan kemudahan akses permodalan dari pihak non bank (seperti koperasi atau lembaga kredit mikro)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diperlukan kebijakan Pemda dalam memediasi antara BUMDes dengan pihak yang menyediakan sumber pendanaan (seperti CSR, perbankan, dll)

Urutan prioritas kepentingan :

Faktor	Urutan
Diperlukan kemudahan akses permodalan dari pihak perbankan	
Diperlukan kemudahan akses permodalan dari pihak non bank (seperti koperasi atau lembaga kredit mikro)	
Diperlukan kebijakan Pemda dalam memediasi antara BUMDes dengan pihak yang menyediakan sumber pendanaan (seperti CSR, perbankan, dll)	

4. Aspek Ketenagakerjaan

Diperlukan kebijakan upah minimum yang sama-sama menguntungkan BUMDes dan pekerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda perlu memfasilitasi dalam penyelenggaraan bursa pencarian kerja
Diperlukan kebijakan upah minimum yang sama-sama menguntungkan BUMDes dan pekerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda perlu memfasilitasi sarana pelatihan bagi tenaga kerja
Diperlukan kebijakan upah minimum yang sama-sama menguntungkan BUMDes dan pekerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Setiap BUMDes usaha harus menyelenggaraan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerjanya
Diperlukan kebijakan upah minimum yang sama-sama menguntungkan BUMDes dan pekerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diutamakan orietansi penyerapan tenaga kerja lokal
Pemda perlu memfasilitasi dalam penyelenggaraan bursa pencarian kerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda perlu memfasilitasi sarana pelatihan bagi tenaga kerja
Pemda perlu memfasilitasi dalam penyelenggaraan bursa pencarian kerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Setiap BUMDes usaha harus menyelenggaraan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerjanya
Pemda perlu memfasilitasi dalam penyelenggaraan bursa pencarian kerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diutamakan orietansi penyerapan tenaga kerja lokal
Pemda perlu memfasilitasi sarana pelatihan bagi tenaga kerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Setiap BUMDes usaha harus menyelenggaraan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerjanya
Pemda perlu memfasilitasi sarana pelatihan bagi tenaga kerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diutamakan orietansi penyerapan tenaga kerja lokal
Setiap BUMDes usaha harus menyelenggaraan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerjanya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diutamakan orietansi penyerapan tenaga kerja lokal

Urutan prioritas kepentingan :

Faktor	Urutan
Diperlukan kebijakan upah minimum yang sama-sama menguntungkan BUMDes dan pekerja	
Pemda perlu memfasilitasi dalam penyelenggaraan bursa pencarian kerja	
Pemda perlu memfasilitasi sarana pelatihan bagi tenaga kerja	
Setiap BUMDes usaha harus menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerjanya	
Diutamakan orientasi penyerapan tenaga kerja local	

5. Aspek Teknologi Inovasi

Setiap BUMDes harus mempunyai teknologi produksi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Setiap BUMDes harus mempunyai penguasaan teknologi pemasaran
Setiap BUMDes harus mempunyai teknologi produksi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda perlu memberikan insentif bagi kategori BUMDes yang inovatif
Setiap BUMDes harus mempunyai teknologi produksi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda harus memfasilitasi atau mengadakan pelatihan membangun usaha yang inovatif
Setiap BUMDes harus mempunyai teknologi produksi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya pelatihan baik bagi tenaga kerja maupun BUMDes untuk meningkatkan inovasi usaha

Setiap BUMDes harus mempunyai penguasaan teknologi pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda perlu memberikan insentif bagi kategori BUMDes yang inovatif
Setiap BUMDes harus mempunyai penguasaan teknologi pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda harus memfasilitasi atau mengadakan pelatihan membangun uasah yang inovatif
Setiap BUMDes harus mempunyai penguasaan teknologi pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya pelatihan baik bagi tenaga kerja maupun BUMDes untuk meningkatkan inovasi usaha
Pemda perlu memberikan insentif bagi kategori BUMDes yang inovatif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda harus memfasilitasi atau mengadakan pelatihan membangun uasah yang inovatif
Pemda perlu memberikan insentif bagi kategori BUMDes yang inovatif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya pelatihan baik bagi tenaga kerja maupun BUMDes untuk meningkatkan inovasi usaha
Pemda harus memfasilitasi atau mengadakan pelatihan membangun usaha yang inovatif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya pelatihan baik bagi tenaga kerja maupun BUMDes untuk meningkatkan inovasi usaha

Urutan prioritas kepentingan :

Faktor	Urutan
Setiap BUMDes harus mempunyai teknologi produksi	

Setiap BUMDes harus mempunyai penguasaan teknologi pemasaran	
Pemda perlu memberikan insentif bagi kategori BUMDes yang inovatif	
Pemda harus memfasilitasi atau mengadakan pelatihan membangun usaha yang inovatif	
Pentingnya pelatihan baik bagi tenaga kerja maupun BUMDes untuk meningkatkan inovasi usaha	

6. Aspek Pemasaran

Pentingnya asosiasi sebagai kekuatan modal sosial bagi pemasaran para pelaku BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya pembentukan koperasi pemasaran khusus bagi BUMDes
Pentingnya asosiasi sebagai kekuatan modal sosial bagi pemasaran para pelaku BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya pelatihan pemasaran berorientasi ekspor bagi BUMDes
Pentingnya asosiasi sebagai kekuatan modal sosial bagi pemasaran para pelaku BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya pelatihan inovasi pemasaran khususnya bagi BUMDes
Pentingnya asosiasi sebagai kekuatan modal sosial bagi pemasaran para pelaku BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda harus memfasilitasi atau memediasi antara potensi pasar dengan BUMDes
Pentingnya asosiasi sebagai kekuatan modal sosial bagi pemasaran para pelaku BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya menciptakan strategi efisiensi dan efektifitas pemasaran
Pentingnya asosiasi sebagai kekuatan modal sosial bagi pemasaran para pelaku BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbaikan faktor pemasaran lebih di perioritaskan dari pada perbaikan faktor produksi
Pentingnya pembentukan koperasi pemasaran khusus bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya pelatihan pemasaran berorientasi ekspor bagi BUMDes

Pentingnya pembentukan koperasi pemasaran khusus bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya pelatihan inovasi pemasaran khususnya bagi BUMDes
Pentingnya pembentukan koperasi pemasaran khusus bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda harus memfasilitasi atau memediasi antara potensi pasar dengan BUMDes
Pentingnya pembentukan koperasi pemasaran khusus bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya menciptakan strategi efisiensi dan efektifitas pemasaran
Pentingnya pembentukan koperasi pemasaran khusus bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbaikan fator pemasaran lebih di periotaskan dari pada perbaikan faktor produksi
Pentingnya pelatihan pemasaran berorientasi ekspor bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya pelatihan inovasi pemasaran khususnya bagi BUMDes
Pentingnya pelatihan pemasaran berorientasi ekspor bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda harus memfasilitasi atau memediasi antara potensi pasar dengan BUMDes
Pentingnya pelatihan pemasaran berorientasi ekspor bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya menciptakan strategi efisiensi dan efektifitas pemasaran
Pentingnya pelatihan pemasaran berorientasi ekspor bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbaikan fator pemasaran lebih di periotaskan dari pada perbaikan faktor produksi
Pentingnya pelatihan inovasi pemasaran khususnya bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemda harus memfasilitasi atau memediasi antara potensi pasar dengan BUMDes

Pentingnya pelatihan inovasi pemasaran khususnya bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya menciptakan strategi efisiensi dan efektifitas pemasaran
Pentingnya pelatihan inovasi pemasaran khususnya bagi BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbaikan fator pemasaran lebih di periotaskan dari pada perbaikan faktor produksi
Pemda harus memfasilitasi atau memediasi antara potensi pasar dengan BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pentingnya menciptakan strategi efisiensi dan efektifitas pemasaran
Pemda harus memfasilitasi atau memediasi antara potensi pasar dengan BUMDes	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbaikan fator pemasaran lebih di periotaskan dari pada perbaikan faktor produksi
Pentingnya menciptakan strategi efisiensi dan efektifitas pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbaikan fator pemasaran lebih di periotaskan dari pada perbaikan faktor produksi

Urutan prioritas kepentingan :

Faktor	Urutan
Pentingnya asosiasi sebagai kekuatan modal sosial bagi pemasaran para pelaku BUMDes	
Pentingnya pembentukan koperasi pemasaran khusus bagi BUMDes	
Pentingnya pelatihan pemasaran berorientasi ekspor bagi BUMDes	
Pentingnya pelatihan inovasi pemasaran khususnya bagi BUMDes	
Pemda harus memfasilitasi atau memediasi antara potensi pasar dengan BUMDes	
Pentingnya menciptakan strategi efisiensi dan efektifitas pemasaran	
Perbaikan fator pemasaran lebih di periotaskan dari pada perbaikan faktor produksi	

Lampiran 4 Hasil Perhitungan Kuisisioner AHP

Kriteria AHP

No	Ketenagakerjaan	Pemasaran	Teknologi inovasi	Lingkungan usaha	Permodalan
1	15,29	0,54	7,43	28,00	22,14
2	9,33	0,44	27,11	18,22	36,00
3	0,44	9,33	18,22	27,11	36,00
4	8,40	14,24	25,13	15,28	18,24
5	6,00	2,67	6,00	4,00	4,00
6	5,33	3,33	6,00	3,33	4,00
7	5,50	7,00	4,67	4,67	3,83
8	15,29	8,41	7,43	28,00	23,14
9	1,64	2,34	5,14	20,00	17,33
10	13,29	11,27	0,68	12,39	28,00

Aspek Ketenagakerjaan

No	Upah minimum	Bursa pencarian kerja	Pelatihan	Ketrampilan	Tenaga kerja lokal
1	3,87	0,93	18,00	13,20	20,00
2	22,14	0,54	22,14	14,29	14,29
3	6,33	4,83	4,33	1,83	10,00
4	5,13	2,58	8,00	5,40	15,00
5	10,00	2,67	2,67	4,00	7,33
6	12,00	2,67	2,00	7,33	5,33
7	17,24	16,24	17,24	25,14	18,22
8	36,00	1,33	1,33	18,22	27,11
9	18,22	0,44	27,11	27,11	18,22
10	22,14	0,54	22,14	14,29	14,29

Aspek Pemasaran

No	Modal sosial	Kop pemasaran	Pemasaran orientasi ekspor	Pelatihan inovasi pem	Mediasi pasar Pemda	Strategi efisien & efektif	Perbaikan faktor
1	6,67	10,00	2,93	6,67	11,33	12,00	11,33
2	8,65	0,82	22,43	35,14	37,14	37,14	15,57
3	7,67	5,17	9,33	14,00	6,33	11,00	3,83
4	18,45	9,34	15,42	19,48	7,33	32,00	3,90
5	7,33	9,33	7,33	6,00	4,00	9,33	8,00
6	6,67	10,00	8,00	5,33	5,33	6,00	7,33

7	26,37	16,50	25,35	15,47	25,38	25,40	33,27
8	27,33	2,44	2,44	46,00	3,33	45,11	36,22
9	27,33	9,56	18,44	27,33	27,33	36,22	54,00
10	8,65	0,82	22,43	35,14	37,14	36,14	15,57

Aspek Teknologi Inovasi

No	Teknologi Produksi	Teknologi pemasaran	Pemberian insentif dari Pemda	Pelatihan usaha inovasi	Peningkatan usaha inovasi
1	14,24	0,52	9,43	32,00	22,13
2	0,44	9,33	18,22	27,11	36,00
3	18,22	36,00	1,33	1,33	27,11
4	17,24	9,37	27,13	15,22	17,24
5	8,00	8,00	5,33	2,00	4,67
6	8,00	8,00	2,00	3,33	5,33
7	1,49	10,20	8,25	4,00	15,00
8	6,00	5,00	3,83	2,83	6,00
9	14,24	24,14	0,54	24,13	15,27
10	0,80	15,20	5,60	10,40	20,00

Aspek Lingkungan Usaha

No	Lingkungan kondusif	Min Gejolak Sosial	kebijakan pemda	kemudahan izin
1	0,73	5,00	7,00	7,00
2	15,14	7,29	14,14	7,29
3	2,33	4,00	3,00	4,50
4	3,00	1,34	13,00	9,00
5	6,33	2,33	1,67	7,00
6	6,33	1,67	0,87	7,00
7	9,00	17,13	9,24	16,13
8	8,25	9,22	0,33	27,00
9	18,11	18,11	9,22	0,33
10	15,14	7,27	14,14	7,29

Aspek Permodalan

No	Mediasi dari Pemda	akses modal Bank	Akses modal non Bank
1	8,14	0,27	14,00
2	9,11	0,22	18,00
3	8,14	1,11	18,00
4	8,14	0,25	15,00
5	1,33	1,33	6,00
6	1,33	1,50	5,00
7	1,14	2,00	8,00
8	4,00	2,33	1,50
9	8,14	0,27	14,00
10	4,00	1,33	2,00

Lampiran 5 Surat Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (274) 589621, 512474, Fax. (274) 586117
E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B-1048 /Un.02/DEB.1/PN.01.11/C3/2018
Sifat : Penting
Lamp. : 3 bendel
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta 09-Maret- 2018

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kepala BUMDes Panggung Lestari

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi yang berjudul **“Analisa Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Metode Analytical Hierarchy Process Studi Desa Panggungharjo Bantul ”**, dengan Dosen Pembimbing Muh. Rudi Nugroho S.E., M.Sc, diperlukan penelitian.

Oleh karena itu kami mengajukan permohonan izin kepada Bapak/Ibu Pimpinan BUMDes Panggung Lestari bagi mahasiswa kami :

Nama : M. Khairul Amrullah
NIM : 14810098
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas diperkenankannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

fCasmini

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian KESBANPOL



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3059/Kesbangpol/2018
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
 Up. Kepala BAPPEDA Bantul
 di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga
 Nomor : B-1048/Un.02/DEB.1/PN.01.1/03/2018
 Tanggal : 9 Maret 2018
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "ANALISA STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) STUDI DI DESA PANGGUNGHARJO BANTUL" kepada:

Nama : M. KHAIRUL AMRULLAH
 NIM : 14810098
 No.HP/Identitas : 085745439403/3329071101950001
 Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga
 Lokasi Penelitian : Desa Panggungharjo Bantul
 Waktu Penelitian : 13 Maret 2018 s.d 13 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
 BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
 NIP. 196010281992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian BAPPEDA Bantul


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. : 67533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Email: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070 / Reg / 0839 / S / 2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY
Nomor : 074/3059/Kesbangpol/2018
Tanggal : 13 Maret 2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1. Nama : M. IHAIRUL AMRULLAH
2. NIP/NIM/No.KTP : 3329071101950001
3. No. Telp/ HP : 085745439403

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : ANALISA STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) STUDI DI DESA PANGGUNGHARJO BANTUL
b. Lokasi : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon
c. Waktu : 13 Maret 2018 s/d 13 September 2018
d. Status izin : Baru
e. Jumlah anggota : -
f. Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat izin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 13 Maret 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan

TRI SUMIATI, SH
NIP. 19680626 199803 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
5. Camat Sewon
6. Lurah Desa Panggungharjo, Kec. Sewon
7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran 8 Dokumentasi

a. Nomor NPWP BUMDes Panggungharjo



b. Penguatan Ekonomi Perempuan



c. Tempat Pengelolaan Sampah BUMDes Panggungharjo



d. Unit Usaha Kampoeng Mataraman BUMDes Panggunharjo



e. Produk-produk BUMDes Panggunharjo



CURICULUM VITAE

Nama : M. Khairul Amrullah

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 11 Januari 1995

Agama : Islam

Alamat : Desa Kalipucang 17/04, Kec. Jaibarang,
Kab. Brebes, Prov, Jawa Tengah

Email : amrullahkhairul11@gmail.com

NO. HP : 085745439403

Nama Ayah : Subkhi S.E

Nama Ibu : Amriyah

Riwayat Pendidikan

1. MI Miftahul Huda Kalipucang (Lulus 2006)
2. SMP Negeri 5 Brebes (Lulus 2009)
3. KMI Pondok Modern Darussalam (Lulus 2013)
4. Institut Islam Darussalam (ISID) (Lulus 2014)
5. UIN Sunan Kalijaga Prodi Ekonomi Islam (2014-2018)